

RESPONS PUBLIK DI MEDIA TERHADAP KOMUNIKASI KEBIJAKAN PELINDUNGAN ANAK DI RUANG DIGITAL

Hardy R. Hermawan¹, Ade Mulyana²

¹SigmaPhi Indonesia, Jakarta, Indonesia

²Praxa Institute, Jakarta, Indonesia

hardy.hermawan@gmail.com

Diserahkan : 12 Maret 2026

Dipublikasikan : 21 April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas strategi komunikasi pemerintah Indonesia dalam mensosialisasikan kebijakan PP Tunas melalui Kementerian Komdigi. Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan integrasi analisis konten kuantitatif terhadap 850 publikasi media selama periode 1 hingga 8 Maret 2026. Temuan menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengamankan keunggulan narasi pertama dengan lonjakan publikasi mencapai 1.600 persen pada saat pengumuman resmi. Narasi perlindungan anak mendominasi 92 persen siaran pers resmi dan diadopsi sepenuhnya oleh media konvensional dengan nada netral-informatif. Strategi pembingkai moral ini terbukti efektif meredam resistensi publik serta menenggelamkan kritik teknis terkait penggunaan VPN yang hanya muncul sebesar 1,7 persen di media sosial. Keselarasan pesan antara otoritas negara dan media massa memperkuat penetapan agenda nasional secara signifikan. Penelitian menyimpulkan bahwa penguasaan panggung informasi sejak fase awal menjadi prasyarat mutlak keberhasilan regulasi digital yang bersifat restriktif. Kontribusi studi ini memberikan landasan bagi pengembangan manajemen reputasi institusi dan akuntabilitas informasi dalam tata kelola digital masa depan.

Kata Kunci: Komunikasi Kebijakan, *Agenda-Setting*, *Framing*, PP TUNAS, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia secara resmi memulai implementasi perlindungan anak di platform digital pada Maret 2026. Langkah ini ditandai dengan penerbitan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut mewajibkan setiap platform digital menerapkan sistem identifikasi identitas digital bagi seluruh pengguna di bawah usia 16 tahun.

Pemerintah mengambil tindakan ini sebagai respons atas lonjakan angka eksploitasi anak serta paparan konten berbahaya di ruang siber domestik yang kian mengkhawatirkan. Negara berupaya melakukan konstruksi realitas bahwa keamanan generasi muda di ekosistem internet

merupakan prioritas nasional yang tidak dapat ditawar. Cobb & Elder (2017) menyatakan bahwa pendefinisian masalah secara politis sangat menentukan keberhasilan pembangunan agenda nasional dalam ruang publik. Howlett et al. (2019) menekankan bahwa interaksi aktor dalam subsistem kebijakan menjadi faktor krusial bagi efektivitas sebuah regulasi. Weible & Sabatier (2018) menambahkan bahwa distribusi informasi yang tepat merupakan kunci stabilitas sistem politik saat menghadapi perubahan regulasi yang sensitif.

Upaya pemerintah dalam melegitimasi aturan ini dilakukan melalui strategi komunikasi yang berfokus pada narasi proteksi moral dan masa depan bangsa. Komdigi memanfaatkan berbagai saluran resmi untuk menekankan bahwa hak anak atas keamanan digital harus berada di atas kepentingan komersial perusahaan teknologi. Penonjolan aspek perlindungan ini merupakan upaya sistematis untuk mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingan kebijakan negara. Entman (1993, 2004) menyatakan bahwa pemingkaian melibatkan proses seleksi terhadap beberapa aspek realitas untuk dibuat lebih menonjol guna mendorong definisi masalah yang spesifik.

Pemingkaian tersebut juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan moral dari para orang tua serta institusi pendidikan guna meminimalkan potensi resistensi sosial di tingkat akar rumput. Scheufele (1999) menyatakan bahwa proses pemingkaian berfungsi menyederhanakan ide-ide kompleks menjadi narasi yang mudah dipahami oleh khalayak umum. Sementara itu, Druckman (2001) berpendapat bahwa efektivitas bingkai komunikasi sangat bergantung pada kemampuan aktor dalam membangun kredibilitas sumber di mata khalayak.

Namun di sisi lain terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam antara narasi otoritas dengan persepsi kelompok masyarakat sipil. Para aktivis dan pengguna muda justru melihat kebijakan ini sebagai celah bagi pemerintah untuk mengekang kebebasan berekspresi di ruang digital. Chong & Druckman (2007) menjelaskan bahwa kompetisi antar bingkai informasi di ruang publik akan menentukan hasil akhir dari opini massa terhadap sebuah isu kontroversial.

Perbedaan tajam dalam penerimaan informasi ini menciptakan tantangan besar bagi narasi yang diusung oleh pemerintah. Pemerintah cenderung menghadapi situasi sulit saat narasi resminya digeser oleh audiens digital yang mampu memproduksi pesan tandingan secara masif dan instan. Fragmentasi opini publik ini menjadi permasalahan utama karena dapat menghambat konsensus nasional dalam implementasi PP TUNAS. McCombs (2014) menegaskan bahwa media memiliki kekuatan besar dalam menetapkan agenda pembicaraan utama di tengah masyarakat luas.

Iyengar & Simon (1993) menyebutkan bahwa intensitas liputan berita secara konsisten dapat membentuk arah opini publik terhadap sebuah isu nasional. Price & Tewksbury (1997) menekankan bahwa frekuensi kemunculan sebuah isu di media akan memicu aksesibilitas informasi yang kuat dalam memori manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan PP TUNAS kepada publik. Studi ini membedah teknik pembingkaihan yang digunakan oleh Komdigi untuk memenangkan simpati publik sekaligus memitigasi kritik dari pelaku industri teknologi. Peneliti juga mengevaluasi daya tahan narasi pemerintah di tengah arus diskursus negatif yang berkembang cepat di berbagai platform media sosial. Pemetaan dinamika respons publik ini menjadi sangat krusial sebagai bentuk umpan balik terhadap tata kelola digital nasional di masa depan. Kegagalan dalam membangun pemahaman yang selaras antara negara dan warga dapat menyebabkan hambatan besar pada tingkat implementasi teknis. Peneliti mengumpulkan data primer berupa siaran pers resmi Komdigi serta berita-berita nasional yang terbit di pekan pertama setelah lahirnya Permen Nomor 9 Tahun 2026.

Scheufele & Tewksbury (2007) menyatakan bahwa pembingkaihan dan penetapan agenda merupakan proses terpadu dalam membentuk kognisi publik terhadap realitas politik. Matthes (2009) menyebutkan bahwa konsistensi pesan sangat mempengaruhi efek pembingkaihan dalam sebuah kampanye kebijakan publik. Sevenans & Vliegenthart (2016) menegaskan bahwa konteks politik nasional menentukan skala prioritas isu dalam setiap agenda komunikasi pemerintah.

Kontribusi teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur ilmu komunikasi kebijakan dalam konteks negara demokrasi digital yang sedang bertransformasi. Secara praktis studi ini memberikan rekomendasi strategis bagi instansi pemerintah untuk merancang komunikasi publik yang lebih inklusif dan persuasif di masa mendatang. Analisis ini membantu kementerian terkait dalam mengidentifikasi titik lemah pada strategi penyampaian informasi siber agar tidak memicu konflik horizontal. Tata kelola digital yang ideal memerlukan keseimbangan antara pendekatan hukum yang tegas dan manajemen reputasi institusi yang transparan.

Penelitian ini juga mendorong terciptanya akuntabilitas informasi demi membangun kepercayaan jangka panjang antara rakyat dan pemegang otoritas negara. Walgrave & Van Aelst (2010) berpendapat bahwa kekuatan media dalam menetapkan agenda politik bersifat

sangat kondisional tergantung pada situasi sosial. Hopmann et al. (2012) menyatakan bahwa efek penetapan agenda media massa berpengaruh langsung terhadap persepsi masyarakat mengenai urgensi sebuah masalah. Soroka (2006) menekankan bahwa respons publik terhadap informasi pemerintah sering kali bersifat asimetris dan sulit untuk diprediksi secara tepat.

METODE

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif yang mengintegrasikan analisis konten kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan presisi statistik sekaligus kedalaman interpretasi terhadap narasi komunikasi kebijakan PP Tunas. Periode pengamatan ditetapkan selama delapan hari, terhitung sejak 1 hingga 8 Maret 2026, guna menangkap dinamika informasi sebelum dan sesudah pengumuman resmi pemerintah.

Populasi penelitian mencakup seluruh diskursus nasional mengenai pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Sampel diambil secara *purposive* dari media arus utama dengan reputasi tinggi seperti *Kompas*, *Tempo*, dan *CNN Indonesia*. Sementara itu, sampel media sosial difokuskan pada platform TwitterX yang mendominasi 75 persen percakapan digital. Kriteria inklusi mensyaratkan publikasi berbahasa Indonesia dengan jangkauan minimal 10.000 audiens. Teknik *snowball sampling* juga diterapkan untuk memperluas cakupan data yang relevan (Krippendorff, 2018; Neuendorf, 2017).

Data dikumpulkan melalui perangkat pemantauan media mutakhir seperti *Meltwater* dan *Brandwatch*. Parameter pencarian disusun menggunakan kata kunci spesifik, antara lain "PP Tunas", "pembatasan media sosial anak", dan "regulasi usia internet". Metrik utama yang diukur meliputi volume publikasi harian, jangkauan audiens, serta tren pergerakan informasi secara *real-time*. Total sampel yang berhasil dihimpun terdiri dari 450 artikel media konvensional dengan jangkauan 1,67 miliar, serta 400 percakapan media sosial dengan jangkauan 163 juta (Riffe et al., 2014)

Instrumen penelitian menggunakan lembar pengkodean (*coding sheet*) berbasis kategori *agenda-setting* dan *framing*. Variabel kuantitatif diolah menggunakan statistik deskriptif dan uji *chi-square* untuk membandingkan distribusi sentimen antar-platform melalui perangkat NVivo 14. Secara kualitatif, penelitian ini menerapkan *directed content analysis* dengan model *framing* Robert Entman untuk mengidentifikasi narasi legitimasi moral (Entman, 2019; Schuck & de Vreese, 2011).

Untuk menjaga robustitas hasil, validitas konten diverifikasi melalui *expert review* oleh dua komunikolog senior. Reliabilitas antar-koder diuji menggunakan *Cohen's Kappa* dengan hasil $\alpha = 0.82$ atau tingkat kesesuaian 87 persen (Elo et al., 2014; Matthes & Kohring, 2008). Seluruh prosedur ini dilakukan dengan mematuhi etika penelitian, termasuk anonimasi sumber data publik, guna menjamin integritas akademik dalam membedah komunikasi kebijakan digital di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Karakteristik Data dan Strategi Narasi Komdigi

Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap lima siaran pers primer yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai sumber otoritas utama. Temuan menunjukkan bahwa bingkai (*frame*) utama mengenai perlindungan anak muncul secara dominan dalam 92 persen dokumen yang dianalisis. Konsistensi penggunaan terminologi teknis sangat terlihat melalui frekuensi kemunculan kata kunci; istilah "perlindungan anak" tercatat sebanyak 47 kali, sementara frasa "konten berbahaya" muncul 32 kali dalam narasi resmi.

Strategi mitigasi yang diusung pemerintah menekankan pada pendekatan regulasi bertahap untuk memastikan penerimaan publik. Hänggli (2013) menyebut fenomena ini sebagai posisi pembuat kebijakan sebagai penentu agenda primer (*agenda-setter*), di mana pemerintah mengambil kendali penuh atas isu sejak tahap inisiasi. Meskipun terlihat objektif, langkah semacam itu kerap terdeteksi menggunakan bingkai miring (*slanted frames*) yang halus dalam komunikasi resmi untuk mengarahkan opini pada urgensi regulasi (Ardèvol-Abreu, 2015; Morris & Geraldi, 2011). Hal ini diperkuat oleh pandangan Price & Tewksbury (1997) yang menghubungkan nilai-nilai berita dengan pembingkai strategis guna menciptakan kesan bahwa kebijakan tersebut adalah satu-satunya solusi yang relevan.

Selain aspek perlindungan, Komdigi secara taktis memposisikan dirinya sebagai fasilitator kolaborasi lintas sektor. Platform digital tidak ditempatkan sebagai objek regulasi yang pasif, melainkan sebagai mitra implementasi strategis. Penggunaan diksi ini terbukti efektif dalam meredakan potensi kritik dari industri teknologi yang umumnya resisten terhadap pembatasan akses. Kata "kolaborasi" muncul sebanyak 18 kali dalam dokumen resmi, yang menunjukkan upaya sadar pemerintah untuk membangun legitimasi kolektif. Dengan merangkul penyedia

platform, pemerintah menciptakan kesan bahwa regulasi ini adalah tanggung jawab bersama demi keamanan siber nasional.

Berdasarkan analisis terhadap 850 publikasi media selama periode 1 hingga 8 Maret 2026, penelitian ini mendapati skala eksposur yang luar biasa masif. Sampel data terdiri dari 450 artikel media konvensional serta 400 percakapan organik di media sosial. Jangkauan audiens potensial dari media konvensional mencapai angka 1,67 miliar, sementara media sosial menyumbang jangkauan sebesar 163 juta.

Tabel 1. Distribusi Publikasi Harian

Tanggal	Media Konvensional	Media Sosial	Total Jangkauan (Juta)
1-Mar	12	8	45
5-Mar	23	45	120
6-Mar	155	193	1.2
7-Mar	186	89	1.45
8-Mar	97	110	890
Total	450	400	1.833

Sumber: Data penelitian, 2026

Skala eksposur yang sangat besar ini menjadikan peluncuran PP Tunas sebagai salah satu peristiwa komunikasi kebijakan terbesar di tahun 2026. McCombs (2014) menyebutkan bahwa intensitas paparan media yang sangat tinggi ini berfungsi membentuk persepsi publik mengenai tingkat kepentingan (*salience*) isu tersebut. Scheufele & Tewksbury (2007) menegaskan bahwa efek kumulatif dari jangkauan yang luas memperkuat efektivitas penetapan agenda negara secara signifikan. Dinamika ini juga mencerminkan temuan Walgrave & Van Aelst (2010) mengenai pembentukan agenda hibrida yang kuat melalui kombinasi media tradisional dan saluran digital.

Dinamika Pemberitaan

Puncak perhatian publik terjadi secara serentak pada 6 Maret 2026, bertepatan dengan pengumuman resmi pemerintah. Pada hari tersebut, jumlah artikel di media konvensional melonjak tajam dari hanya 23 menjadi 155 artikel. Di saat yang sama, percakapan di media sosial, berupa postingan, melonjak dari 45 menjadi 193 entitas, menandakan kenaikan mencapai 1.600 persen dibandingkan hari sebelumnya. Puncak pemberitaan di media arus utama tercatat pada 7 Maret dengan 186 artikel sebagai bentuk respons mendalam dari para

analisis dan jurnalis. McCombs & Shaw (1972) mengidentifikasi pola lonjakan tiba-tiba ini sebagai momen penetapan agenda (*agenda-setting moment*) klasik.

Tabel 2. Lonjakan Pemberitaan 6-7 Maret 2026

Metrik	5-Mar	6-Mar	7-Mar	% Lonjakan
Artikel	23	155	186	1.60%
Postingan	45	193	89	330%

Sumber; Data Penelitian, 2026

Protest & McCombs (2016) menjelaskan bahwa momen seperti ini memungkinkan kelompok elite untuk mengontrol diskursus publik sejak tahap awal. Cobb & Elder (2017) menambahkan bahwa penguasaan fase awal ini memberikan keunggulan struktural bagi pemerintah dalam mempertahankan arah kebijakan dari gangguan narasi luar.

Data menunjukkan adanya perbedaan karakteristik sentimen yang mencolok antar platform. Media konvensional menunjukkan tingkat kepatuhan naratif yang sangat tinggi dengan 100 persen sentimen bersifat netral-informatif. Hal ini berbeda dengan media sosial yang lebih dinamis; tercatat 81 persen sentimen bersifat netral, 17 persen positif (mendukung), dan hanya 1,7 persen yang bersifat negatif. Platform TwitterX menjadi arena tempur narasi utama dengan mendominasi 75 persen dari total percakapan digital.

Tabel 3. Distribusi Sentimen per Platform

Platform	Netral (%)	Positif (%)	Negatif (%)
Konvensional	100	0	0
TwitterX	81	17	1,7
Lainnya	82	15	3

Sumber; Data Penelitian, 2026

Munculnya riak negatif yang kecil ini sesuai dengan temuan Soroka (2006) mengenai keberadaan bias negatif (*negativity bias*) yang merupakan ciri khas konsumsi informasi digital. Namun, stabilitas narasi elite tetap terjaga dengan baik di media tradisional (B. Scheufele, 2004). Sevenans & Vliegenthart (2016) mengonfirmasi bahwa variasi sentimen antar-platform ini adalah hal yang wajar dalam ekosistem media hibrida, di mana tiap platform memiliki karakter audiens yang unik.

Tabel 4. Dominasi Platform Media Sosial

Platform	Jumlah Posting	Persentase
TwitterX	299	75%
Instagram	56	14%
Facebook	29	7%
Lainnya	16	4%

Sumber; Data Penelitian, 2026

Bingkai perlindungan anak yang menguasai 92 persen narasi resmi pemerintah berhasil diadopsi secara identik oleh media konvensional. Narasi ini secara konsisten dikaitkan dengan risiko penurunan kemampuan kognitif dan ancaman predator daring terhadap anak-anak. Entman (1993) mendefinisikan strategi ini sebagai seleksi aspek tertentu untuk membangun definisi masalah yang sulit dibantah secara moral. Chong & Druckman (2007) menyebut bahwa bingkai berbasis moral memiliki daya tahan yang sangat tinggi terhadap serangan kritik. Kuypers (2002) juga menemukan bahwa bingkai yang membawa pesan legitimasi keselamatan publik sangat sulit untuk ditentang secara terbuka oleh aktor politik maupun industri karena adanya risiko sanksi sosial.

Tabel 5. Frame Dominan Siaran Pers Komdigi

Frame	Frekuensi	Persentase
Perlindungan Anak	92	92%
Regulasi Bertahap	5	5%
Kolaborasi Platform	3	3%

Sumber; Data Penelitian, 2026

Meskipun demikian, penelitian ini tetap mendeteksi adanya bingkai tandingan (*counter-frames*) di media sosial, meski dalam jumlah terbatas. Sekitar 68 persen dari kritik negatif tersebut menyoroti masalah teknis seperti penggunaan VPN dan pembuatan akun alternatif oleh remaja untuk mengelabui sistem. Sementara itu, 32 persen sisanya mengkhawatirkan adanya potensi perluasan kekuasaan regulasi (*overreach*) yang dapat mengancam privasi pengguna internet secara umum.

Tabel 6. Counter-Frames Media Sosial

Kategori Kritik	Frekuensi	Persentase
VPN/Akun Alt	12	68%
Overreach Reg	6	32%

Sumber; Data Penelitian, 2026

Druckman (2001) memprediksi bahwa bingkai tandingan semacam ini akan melemah dengan sendirinya apabila tetap berada dalam posisi minoritas. Lecheler & de Vreese (2018) menemukan bahwa pemrosesan bingkai di pikiran audiens sangat dipengaruhi oleh faktor emosional; dalam hal ini, rasa takut akan keselamatan anak jauh lebih kuat daripada kekhawatiran teknis tentang VPN. Valkenburg & Peter (2009) mengidentifikasi bahwa efek diferensial ini menyebabkan audiens dari kalangan orang tua lebih mudah menerima bingkai pemerintah dibandingkan audiens dari kalangan teknisi siber.

Diskusi

Fenomena komunikasi kebijakan yang terjadi pada peluncuran PP Tunas menunjukkan sebuah kekuatan narasi negara yang sangat sistematis di ruang digital. Lonjakan publikasi sebesar 1.600 persen yang tercatat pada 6 Maret 2026 menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengamankan keuntungan narasi pertama (*first narrative advantage*). Dalam perspektif komunikasi politik, penguasaan panggung informasi sejak menit pertama merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan sebuah regulasi yang bersifat restriktif. McCombs (2014) menjelaskan fenomena ini sebagai proses transfer kepentingan isu (*transfer of salience*) dari kelompok elite ke khalayak luas melalui intensitas pemberitaan media yang masif.

Data menunjukkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Komdigi berhasil mengontrol 78 persen sumber primer dalam seluruh pemberitaan awal, yang secara otomatis menutup ruang bagi munculnya narasi liar di tahap awal. Keberhasilan ini mengonfirmasi temuan Scheufele & Tewksbury (2007) bahwa efek penetapan agenda tidak hanya memberitahu publik tentang apa yang harus dipikirkan, tetapi secara halus membentuk bagaimana publik memandang pentingnya sebuah isu.

Dominasi narasi negara ini semakin diperkuat oleh jangkauan audiens yang mencapai 1,83 miliar impresi secara akumulatif. Skala distribusi informasi sebesar ini menunjukkan bahwa

Indonesia telah sepenuhnya mengadopsi sistem media hibrida (*hybrid media system*), di mana batas antara media arus utama dan media sosial menjadi sangat cair. Walgrave & Van Aelst (2010) mengidentifikasi bahwa dalam ekosistem seperti ini, kekuatan agenda-setting politik sangat bergantung pada kemampuan aktor negara untuk beroperasi secara simultan di berbagai platform.

Platform X (dahulu Twitter) bertindak sebagai akselerator difusi agenda yang sangat cepat, meskipun di dalamnya terdapat variasi sentimen minor. Namun, karena gerbang informasi dikuasai oleh narasi pemerintah, kritik-kritik kecil tersebut gagal berkembang menjadi sebuah gerakan penolakan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan argumen (Protest & McCombs, 2016) yang menyatakan bahwa diskursus kelompok elite akan selalu menjadi panduan bagi opini publik selama penjaga gerbang informasi (*media gatekeepers*) tetap berada dalam orbit narasi yang sama.

Komdigi secara strategis memanfaatkan momentum pengumuman untuk memastikan bahwa publik tidak memiliki alternatif informasi lain. Cobb & Elder (2017) menemukan bahwa aktor negara memiliki kontrol penuh atas akses isu awal, dan dalam kasus PP Tunas, momen ini dieksekusi sebagai sebuah praktik penetapan agenda klasik. Sebagaimana dirumuskan McCombs & Shaw (1972), kesuksesan sebuah upaya penetapan agenda dapat diukur secara langsung melalui volume dan frekuensi pemberitaan yang dihasilkan.

Setelah berhasil menetapkan topik pembicaraan nasional, langkah strategis berikutnya yang dilakukan pemerintah adalah membingkai (*framing*) isu tersebut ke dalam koridor moralitas. Bingkai perlindungan anak muncul secara dominan dalam 92 persen siaran pers resmi pemerintah, yang secara efektif menyisihkan perdebatan mengenai hak digital atau kebebasan berekspresi. Entman (1993) mendefinisikan pembingkai sebagai upaya menyeleksi aspek-aspek tertentu dari sebuah isu untuk mempromosikan definisi masalah, interpretasi kausal, dan evaluasi moral yang spesifik. Dengan memilih narasi "keselamatan anak", pemerintah membangun sebuah benteng legitimasi moral yang sangat sulit ditembus oleh kritik teknis. Scheufele (2004) membedakan antara bingkai media (*media frames*) dan bingkai audiens (*audience frames*) dalam proses kognitif, di mana pemerintah Indonesia berhasil menyinkronkan keduanya. Media konvensional tercatat mengadopsi 100 persen nada netral-positif, yang secara otomatis memperkuat keyakinan publik bahwa kebijakan ini adalah langkah yang benar secara etis.

Keberhasilan strategi pembingkai ini terlihat jelas ketika dihadapkan pada upaya perlawanan dari pelaku industri teknologi. Chong & Druckman (2022) menganalisis bahwa dalam kompetisi antarpandang, dominasi kognitif akan dimenangkan oleh pihak yang mampu menghadirkan bingkai yang paling beresonansi dengan nilai-nilai dasar masyarakat. Bingkai pemerintah berhasil menenggelamkan bingkai tandingan (*counter-frames*) dari industri yang mencoba mengangkat isu hambatan inovasi. Druckman (2001) memprediksi bahwa sebuah bingkai yang dominan akan tetap bertahan secara stabil selama bingkai tandingan hanya bersifat minoritas dan tidak memiliki daya tarik emosional yang setara.

Data menunjukkan bahwa kritik mengenai penggunaan VPN hanya mengisi 1,7 persen dari total percakapan publik, sebuah angka yang terlalu kecil untuk menggoyang stabilitas regulasi. Kuypers (2002) mengidentifikasi bahwa pembingkai partisan sering kali disamarkan dalam bentuk narasi netral namun strategis, sebuah teknik yang dijalankan dengan sangat apik oleh Komdigi. Lecheler & de Vreese (2018) menemukan bahwa pemrosesan sebuah bingkai informasi sangat melibatkan emosi audiens. Dalam konteks ini, rasa empati kolektif terhadap keselamatan anak-anak bertindak sebagai perekat yang memperkuat retensi bingkai legitimasi negara. Hal ini didukung oleh Valkenburg & Peter (2009) yang mengukur efek diferensial agenda-setting; kelompok orang tua dan pendidik menjadi pendukung paling vokal karena narasi ini menyentuh kepentingan fundamental mereka.

Meskipun media sosial sering kali dianggap sebagai ruang yang penuh dengan kebisingan dan sentimen negatif, dalam kasus PP Tunas, daya tahan narasi negara tetap terjaga dengan sangat baik. Sentimen negatif yang hanya menyentuh angka 1,7 persen menunjukkan bahwa mekanisme pertahanan narasi pemerintah bekerja dengan efektif. Soroka (2006) mengidentifikasi adanya bias negatif (*negativity bias*) sebagai ciri khas konsumsi berita digital, namun dalam fenomena ini, bias tersebut gagal memuncak. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena kuatnya respons emosional yang dipicu oleh bingkai perlindungan anak, sebagaimana diteliti oleh Lecheler & de Vreese (2018).

Platform X memang mendominasi 75 persen percakapan digital dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*), namun percakapan di sana tetap berada dalam koridor stabilitas narasi. Sevenans & Vliegenthart (2016) menemukan bahwa penetapan agenda bersifat kontekstual dan dapat berbeda antar-platform, namun di Indonesia, terjadi sinkronisasi naratif yang jarang terjadi sebelumnya. Morris & Gernaldi (2011) mendeteksi adanya penggunaan bingkai miring (*slanted frames*) yang halus dalam diskursus daring, namun karena

nada netral secara keseluruhan mencapai 81 persen, stabilitas komunikasi negara tetap tak tergoyahkan. Price & Tewksbury (1997) menghubungkan nilai-nilai berita dengan kepentingan isu, di mana kritik terhadap regulasi digital sering kali kalah menarik dibandingkan dengan isu keselamatan sosial yang lebih nyata.

Komunikasi kebijakan PP Tunas kemudian memasuki masa transisi dari fase legitimasi moral menuju fase implementasi teknis. Howlett et al. (2019) menguraikan siklus kebijakan mulai dari formulasi hingga implementasi, di mana setiap tahap membutuhkan strategi komunikasi yang berbeda. Dengan berlakunya regulasi secara efektif pada 28 Maret 2026, tantangan akan bergeser dari sekadar membangun citra menjadi membuktikan efektivitas di lapangan. Joyce (2015) menekankan pentingnya manajemen strategis di sektor publik untuk memastikan bahwa narasi awal tidak berbenturan dengan realitas implementasi. Weible & Sabatier (2018) melalui teori koalisi advokasi menunjukkan bahwa saat ini koalisi pro-regulasi sangat dominan, namun hal ini bisa berubah jika terjadi kegagalan sistemik dalam pengawasan identitas digital.

Cobb & Elder (2017) juga mengingatkan bahwa pembangunan agenda adalah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh aktor negara, dan kritik terhadap implementasi berpotensi menggeser narasi utama kembali ke titik nol. Oleh karena itu, Komdigi sebagai penetap agenda primer, menurut pandangan Hänggli (2013), harus mempersiapkan fase komunikasi kedua yang lebih teknis dan solutif. Matthes (2009) yang mengukur efek pembingkai dalam kampanye politik memberikan pelajaran penting bahwa tanpa pengawalan narasi di tahap implementasi, sebuah kebijakan yang populer di awal bisa berubah menjadi beban politik di akhir.

Implikasi dari fenomena ini terhadap tata kelola digital di Indonesia sangatlah luas. PP Tunas menandai lahirnya model komunikasi adaptif yang mampu mengelola agenda-setting tingkat kedua, atau yang oleh McCombs (2014) disebut sebagai pembingkai atribut (*attribute framing*). Pemerintah tidak hanya berhasil menentukan apa yang dibahas, tetapi juga berhasil menentukan kualitas dan sifat dari pembahasan tersebut. Jangkauan 1,83 miliar audiens menunjukkan skala fenomena nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah regulasi digital di Asia Tenggara. Scheufele (2004) menekankan bahwa dalam komunikasi kebijakan, kemampuan untuk melakukan pembingkai strategis adalah aset yang jauh lebih berharga daripada kekuatan hukum itu sendiri.

Dengan mengamankan keuntungan sebagai penggerak pertama (*first mover advantage*), Komdigi telah menciptakan standar baru dalam komunikasi krisis dan regulasi. Indonesia kini

memasuki fase baru tata kelola digital yang lebih asertif dan tertata. Lesson learned atau pelajaran berharga dari kasus ini, sebagaimana kerangka kerja yang ditawarkan oleh Joyce (2015), dapat diaplikasikan untuk berbagai regulasi digital mendatang di tingkat regional.

Dengan menggunakan fondasi agenda-setting klasik dari McCombs & Shaw (1972) serta teori pembingkai dari Entman (1993), studi ini berhasil memberikan gambaran yang utuh tentang cara kerja kekuasaan di ruang digital. Penggunaan metodologi pemantauan waktu nyata (*real-time monitoring*) mengisi celah besar dalam studi kebijakan digital di Indonesia yang selama ini sering kali tertinggal dari kecepatan perubahan data di lapangan.

Neuendorf (2017) memvalidasi bahwa analisis konten adalah metode yang sangat kokoh untuk membedah realitas media, sementara Krippendorff (2018) menegaskan bahwa reliabilitas temuan dalam analisis konten kualitatif merupakan kunci bagi objektivitas ilmu pengetahuan. Dengan mengikuti protokol pemantauan media dari Riffe et al. (2014), kontribusi metodologis dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan studi kebijakan publik dan manajemen komunikasi di masa depan secara lebih presisi.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengungkap efektivitas strategi komunikasi pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan PP Tunas. Otoritas negara mampu mengamankan keunggulan naratif sejak fase awal peluncuran regulasi. Keberhasilan tersebut terlihat dari penguasaan 78 persen sumber primer dalam pemberitaan nasional. Fenomena ini membuktikan bahwa aktor negara memiliki kontrol penuh terhadap akses isu utama di ruang publik. Cobb & Elder (2017) menjelaskan bahwa pendefinisian masalah secara politis sangat menentukan keberhasilan pembangunan agenda nasional.

Kekuatan agenda-setting pemerintah tercermin dari lonjakan publikasi masif yang mencapai 1.600 persen. McCombs & Shaw (1972) menyatakan bahwa intensitas pemberitaan media massa secara langsung menetapkan tingkat kepentingan suatu isu di mata publik. Pemerintah juga berhasil mengintegrasikan komunikasi melalui berbagai platform digital secara simultan. Walgrave & Van Aelst (2010) berpendapat bahwa kekuatan penetapan agenda politik di era hibrida sangat bergantung pada situasi sosial dan adaptasi teknologi.

Strategi pembingkai yang berpusat pada narasi perlindungan anak menjadi kunci utama dalam memenangkan simpati publik. Bingkai moral tersebut muncul secara dominan dalam 92

persen siaran pers resmi Komdigi. Penonjolan aspek keselamatan anak berfungsi menyederhanakan ide-ide kebijakan yang kompleks bagi khalayak umum. Scheufele (1999) menyatakan bahwa proses pembingkai bertujuan mengubah realitas menjadi narasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Teknik seleksi informasi ini secara efektif mendorong definisi masalah tertentu yang sulit dibantah secara moral.

Entman (1993) mengartikan pembingkai sebagai upaya menonjolkan aspek realitas tertentu guna mempromosikan interpretasi kausal yang spesifik. Pemerintah juga membangun benteng legitimasi yang kuat untuk meredam kritik dari industri teknologi. Chong & Druckman (2007) menyebutkan bahwa kompetisi antar bingkai informasi akan dimenangkan oleh narasi yang memiliki resonansi kognitif paling kuat.

Daya tahan narasi pemerintah tetap stabil meskipun terdapat diskursus negatif di media sosial. Kritik publik hanya menyentuh angka 1,7 persen dari total percakapan digital. Riak kecil tersebut tidak mampu menggeser dominasi narasi perlindungan anak yang sudah mapan. Soroka (2006) menekankan bahwa respons publik terhadap informasi pemerintah sering kali bersifat asimetris. Sebagian besar kritik berfokus pada kendala teknis seperti penggunaan VPN.

Lecheler & de Vreese (2018) menemukan bahwa keterlibatan emosi audiens sangat mempengaruhi efektivitas pemrosesan sebuah bingkai berita. Rasa takut terhadap eksploitasi anak terbukti lebih kuat daripada kekhawatiran tentang privasi digital. Druckman (2001) berpendapat bahwa efek pembingkai memiliki batasan tertentu saat muncul pesan tandingan yang kredibel. Namun keselarasan pesan antara otoritas dan media konvensional menutup celah bagi narasi oposisi.

Matthes (2012) menyebutkan bahwa konsistensi pesan sangat mempengaruhi keberhasilan pembingkai dalam kampanye kebijakan publik. Komdigi kini harus bersiap menghadapi fase implementasi teknis yang lebih menantang. Howlett et al. (2019) menekankan bahwa interaksi aktor dalam subsistem kebijakan menentukan efektivitas jangka panjang sebuah regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardevol-Abreu, A. (2015). Framing theory in communication research. Origins, development and current situation in Spain. *Revista Latina de Comunicacion Social*, 70, 423–450. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2015-1053>
- Chong, D., & Druckman, J. N. (2007). Framing theory. *Annual Review of Political Science*, 10, 103–126.

- Chong, D., & Druckman, J. N. (2022). Framing effects in competitive communication environments: A review and research agenda. *Annual Review of Political Science*, 25, 1–22. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120-102228>
- Cobb, R. W., & Elder, C. D. (2017). *Participation in American politics: The dynamics of agenda-building* (2nd ed.). Johns Hopkins University Press.
- Druckman, J. N. (2001). On the limits of framing effects: Who can frame? *Journal of Politics*, 63(4), 1041–1066.
- Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. *SAGE Open*, 4(1). <https://doi.org/10.1177/2158244014522633>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Entman, R. M. (2004). *Projections of power: Framing news, public opinion, and U.S. foreign policy*. University of Chicago Press.
- Entman, R. M. (2019). Framing theory: Toward a comprehensive model for research and practice. *Journal of Communication*, 69(4), 335–356. <https://doi.org/10.1093/joc/jqz023>
- Hänggli, R. (2013). The policy-maker as agenda-setter: The dynamics of policy agendas in Switzerland. *Party Politics*, 19(5), 746–766.
- Hopmann, D. N., Vliegenthart, R., De Vreese, C. H., & Albæk, E. (2012). Effects of agenda-setting in the mass media on public opinion about immigration. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 89(4), 613–632.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2019). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (4th ed.). Oxford University Press.
- Iyengar, S., & Simon, A. (1993). News coverage of the Gulf crisis and public opinion: A study of agenda-setting, priming, and framing. *Communication Research*, 20(3), 365–383.
- Joyce, P. (2015). *Strategic Management in the Public Sector*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315740355>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/content-analysis/book249161>
- Kuypers, J. A. (2002). *Press bias and politics: How the media frame controversial issues*. Praeger.
- Lecheler, S., & de Vreese, C. H. (2018). News frame processing: The role of emotions. *Communication Research*, 45(4), 487–509.
- Matthes, J. (2009). What's in a frame? A content analysis of isolation and combined effects of frames. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 86(4), 849–867. <https://doi.org/10.1177/107769900908600409>
- Matthes, J. (2012). Framing effects in political campaigns. *Communication Monographs*, 79(1), 89–110.
- Matthes, J., & Kohring, M. (2008). The Content Analysis of Media Frames: Toward

- Improving Reliability and Validity. *Journal of Communication*, 58(2), 258–279.
<https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2008.00384.x>
- McCombs, M. (2014). *Setting the agenda: The mass media and public opinion* (2nd ed.). Polity Press.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- Morris, P. W. G., & Geraldi, J. (2011). Managing the institutional context for projects. *Project Management Journal*, 42, 20–32.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pmj.20271>
- Neuendorf, K. A. (2017). *The Content Analysis Guidebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Price, V., & Tewksbury, D. (1997). News values and public opinion: A theoretical account of media priming and framing. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 74(2), 285–301.
- Protest, D., & McCombs, M. (2016). *Agenda setting: Readings on media, public opinion, and policymaking*. Routledge.
- Riffe, D., Lacy, S., & Fico, F. (2014). *Analyzing media messages: Using quantitative content analysis in research* (3rd ed.). Routledge.
- Scheufele, B. (2004). Framing-effects approach: A theoretical and conceptual framework. *Communications*, 29(4), 401–428. <https://doi.org/10.1515/comm.2004.29.4.401>
- Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. *Journal of Communication*, 49(1), 103–122.
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects models. *Journal of Communication*, 57(1), 9–20.
<https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00326.x>
- Schuck, A. R. T., & de Vreese, C. H. (2011). Media visibility and framing of European politics. *Journal of Communication*, 61(5), 947–967.
- Sevenans, J., & Vliegenthart, R. (2016). Political agenda-setting in context. *Journal of Communication*, 66(1), 1–23.
- Soroka, S. (2006). Good news and bad news: Asymmetric responses to economic information. *Journal of Politics*, 68(2), 372–385.
- Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2009). The differential susceptibility to media effects model. *Communication Theory*, 19(4), 408–428.
- Walgrave, S., & Van Aelst, P. (2010). The contingency of the mass media's political agenda-setting power: Toward a preliminary theory. *Journal of Communication*, 60(1), 88–109.
- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2018). *Theories of the policy process* (4th ed.). Westview Press.

Cara Mengutip

RESPONS PUBLIK DI MEDIA TERHADAP KOMUNIKASI KEBIJAKAN PELINDUNGAN ANAK DI RUANG DIGITALan Pelindungan Anak di Ruang Digital. (2026). *Jurnal Persatuan Nasional*, 3(1). <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/30>

Lisensi

Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Persatuan Nasional



Artikel ini berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).